

**EFEKTIVITAS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DALAM PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK PADA KORBAN BENCANA  
BANJIR DI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Rahmat Wijanarko  
NPP.29.0327

Asdaf Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : rahmat.rw31@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Logistics assistance is a series of actions that involve the procurement, storage and distribution of products according to the type, quantity, time, and location desired or needed to meet the basic needs of human life for clothing, food and shelter. Disaster management in terms of logistics distribution always faces very complex problems. This can be seen in the case of the flood disaster in Tanjungpinang City which shows the weak implementation of the distribution of disaster logistics assistance, such as the lack of budget and the slow distribution of aid to victims affected by the disaster. **Purpose:** This study aims to obtain a description of how the distribution of logistical assistance in Tanjungpinang City. Then find out what are the factors both supporting and inhibiting the Government in implementing logistical assistance. **Method:** This study uses a qualitative descriptive design with an inductive approach. The theory used is Duncan's Theory of Effectiveness. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. **Result:** The results of the distribution of logistical assistance, that this program has been implemented quite effectively, but there are still influencing factors, namely regarding, lack of human resources, long distribution mechanisms, and lack of budget. **Conclusion:** This causes the distribution of logistics assistance to be less effective in Tanjungpinang City.

**Keyword:** Logistics Assistance, Flood Disaster, Emergency Response

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Bantuan logistik merupakan serangkaian tindakan yang melibatkan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian produk sesuai dengan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi yang

diinginkan atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia akan sandang, pangan, dan papan. Penanganan bencana dalam hal distribusi logistik selalu menghadapi permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini tampak pada kasus bencana banjir di Kota Tanjungpinang yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan distribusi bantuan logistik bencana, seperti kurangnya anggaran dan lambannya pendistribusian bantuan kepada korban terdampak bencana. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki maksud untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana penyaluran bantuan logistik di Kota Tanjungpinang. Kemudian mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor baik pendukung dan penghambat dari Pemerintah dalam melaksanakan bantuan logistik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas dari Duncan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Hasil dari penyaluran bantuan logistik, bahwa program ini telah terlaksana cukup efektif, tetapi masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu mengenai, sumber daya manusia yang masih kurang, mekanisme penyaluran yang panjang, dan kurangnya anggaran. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang efektifnya penyaluran bantuan logistik di Kota Tanjungpinang. **Kata Kunci:** Bantuan Logistik, Bencana Banjir, Tanggap Darurat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 220.812 jiwa dengan besaran penduduk 1.527 jiwa/km<sup>2</sup> dan merupakan jumlah penduduk terbanyak posisi kedua di provinsi Kepulauan Riau setelah Kota Batam. Salah satu permasalahan yang dapat terjadi yaitu bencana, sering terjadi di berbagai daerah atau kawasan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam (human error or technical difuse) adalah bencana banjir. Banjir selama ini telah menjadi peristiwa yang umum dan sering terjadi dimasyarakat. Karena itu permasalahan yang berkaitan dengan bencana banjir sangat perlu diperhatikan bagi individu, sekelompok individu atau Pemerintah Daerah. Hal ini juga diakibatkan oleh cuaca buruk yang disertai hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang mengakibatkan terjadinya banjir yang melanda disejumlah wilayah di Tanjungpinang. Akibat dari cuaca tersebut ditambah dengan perilaku kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, membuat kondisi drainase menjadi kurang baik. Pengelolaan manajemen logistik penanggulangan bencana ditangani secara keseluruhan dan menjadi sistem yang terintegrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi

penanggung jawab atas dalam penyaluran logistik yang mencakup perencanaan kebutuhan, perencanaan penyaluran, pengadaan, penerima bantuan, penyimpanan, serta peralatan penanggulangan bencana. Pengelolaan logistik yang efektif dan efisien merupakan parameter penting dalam penyaluran bantuan bencana alam dan bantuan sosial serta menjadi peran penting dalam upaya penanggulangan bencana. Sehingga dukungan logistik dapat memenuhi kebutuhan korban bencana dari segi waktu, lokasi, target, kuantitas, dan kualitas.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah membantu mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Banjir mengakibatkan kerugian masyarakat seperti timbulnya masalah kesehatan, ketersediaan air bersih, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi. Banjir juga dapat menyebabkan kerusakan pada kawasan pemukiman, bangunan, dan infrastruktur, serta menghambat angkutan darat. Namun harus diakui, meski sudah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penanggulangan bencana tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hal ini juga disebabkan bencana banjir yang terjadi tiap tahunnya di Tanjungpinang sehingga diperlukan penanganan khusus dalam penanggulangan bencana, termasuk perencanaan dalam bantuan logistik bencana.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Persebaran terjadinya bencana banjir di Kota Tanjungpinang selama kurun waktu dari Tahun 2016-2021, telah terjadi setiap datangnya musim penghujan di Kota Tanjungpinang. Kebanyakan penyebab terjadinya kebakaran sebagian besar diakibatkan oleh kondisi cuaca, keadaan lingkungan dan lainnya. Pada bulan Januari 2021, data dari BPBD Kota Tanjungpinang juga menyebutkan terdapat 80 kejadian banjir dan 27 rumah yang terkena tanah longsor di wilayah Tanjungpinang. Akibatnya sebagian besar warga terkena dampak dari bencana banjir dan harus diungsikan ke tempat aman serta terdapat sejumlah warga yang masih terjebak di rumah mereka yang tergenang banjir. Sehingga mengharuskan petugas untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di rumahnya. Bencana banjir terjadi salah satu faktor pendukung penyebab terjadinya banjir juga didukung oleh kondisi alam. Akibat dari cuaca tersebut ditambah dengan perilaku kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, membuat kondisi drainase menjadi kurang baik. Akibatnya sebagian besar warga terkena dampak dari bencana banjir dan harus diungsikan ke tempat aman serta terdapat sejumlah warga yang masih terjebak di rumah mereka yang tergenang banjir. Sehingga mengharuskan petugas untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di rumahnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya suatu organisasi,

antara lain kurangnya sarana dan prasarana, alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, hingga kekurangan sumber daya manusia.

Pemberian bantuan logistik yang dilakukan pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggap masih belum efektif dalam pelaksanaannya, berdasarkan kejadian yang terjadi setelah kejadian pertama pemerintah dinilai lambat dalam penanganan bencana. Seharusnya kejadian banjir tidak terjadi kembali jika pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menganalisa dan pelaksanaan pemberian bantuan logistik semakin efektif dan efisien.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah contoh beberapa penelitian yang menggambarkan letak perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan letak perbedaan penelitian. Kajian Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir: Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana Di Kota Kendari Tahun 2017 (Nasrullah, Eko Teguh Peripurno dan Johan Danu Prasetyo, 2021), menjelaskan bahwa berdasarkan informasi kejadian yang diperoleh TRC tanggap darurat bencana banjir melaksanakan pengkajian dampak bencana dan memberikan dukungan pendampingan terhadap penanganan bencana banjir di Kota Kendari. Pengelolaan tanggap darurat bencana banjir yang dilaksanakan di Kota Kendari telah berjalan akan tetapi pelaksanaannya belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakatnya. Permasalahan yang muncul yakni kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan logistik dan peralatan yang tidak memadai, kurangnya informasi yang akurat mengenai yang ada dilapangan atau lokasi bencana banjir, serta terbatasnya anggaran yang dimiliki. Efektivitas Kebijakan Penyaluran Logistik Bencana (Martinus Syamsudin, 2019), menjelaskan Fokus penelitian adalah efektivitas BPBD dalam menyalurkan bantuan logistik bencana banjir di Kabupaten Sintang. Mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai prosedur penanganan bencana, belum dapat ditangani secara maksimal karena sulitnya akses ke lokasi bencana banjir. Santunan Dan Bantuan Korban Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur (Rizki Megawati, 2013), Mekanisme / Prosedur Pelayanan pemberian santunan dan bantuan bencana, Konsistensi petugas dalam penyaluran bantuan dana, Kemampuan Petugas pelaksana dalam menyalurkan bantuan, baik secara kualitas maupun kuantitas, ketepatan dalam penyaluran bantuan dan kepada kelompok sasaran, dan Kerjasama antar petugas pelaksana dalam memberikan santunan dan bantuan pada sasaran. Kurang optimalnya implementasi kebijakan Bupati sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati nomor 21 tahun 2010. Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro (Ischa Maburris Sahilala, Sarwono, Imam Hanafi, 2015), yakni Penerapan mekanisme

pendistribusian bantuan tersebut telah sesuai dengan SOP yang berlaku dan fungsi-fungsi manajemen logistik, namun juga terdapat kendala yang dapat menghambat mekanisme pendistribusian bantuan logistik. Pentingnya tata kelola pendistribusian bantuan pada saat kondisi darurat, menuntut adanya koordinasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam mekanisme pendistribusian bantuan. Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018 (Muhammad Lukmanul Hakim, 2018), menjelaskan Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap korban bencana kebakaran masih dianggap lemah dan harus diperhatikan terutama pihak terkait. Penyaluran bantuan sosial ini diharapkan membantu kelangsungan hidup dasar kepada korban bencana untuk bertahan hidup yang berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang penyaluran bantuan logistik. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini secara umum terdapat pada pendekatan fokus analisis logistik. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus analisis peruntukan logistiknya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan logistik pada korban bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang yang belum pernah diteliti dan dianalisis oleh peneliti lain sebelumnya.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penyaluran Bantuan Logistik Pada Korban Bencana Banjir di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

## **II. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif guna untuk melukiskan, mendeskripsikan, dan menjawab secara lebih detail masalah yang nantinya diteliti dengan mendalami secara maksimal seseorang, suatu kelompok atau fenomena. Penelitian kualitatif ini manusia yakni sebagai instrumen penelitian dan hasil penelitiannya merupakan kata-kata atau penjelasan faktual dengan keadaan sebenarnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yang menjadi sumber data primer nantinya adalah dari pihak Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, Lurah Air Raja dan masyarakat yang terkena dampak banjir di Kota Tanjungpinang. Sumber data sekunder didapatkan dari dokumen dan

media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penyaluran bantuan logistik pada korban bencana banjir Kota Tanjungpinang. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif, jenis sumber data atau informasi ditetapkan secara sengaja, yang disebut purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel dengan tidak secara acak, wilayah atau jenjang, tetapi berdasarkan adanya penilaian yang berfokuskan pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang berkompeten, memahami dan mengetahui terkait dengan penyaluran bantuan logistik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang. Teknik wawancara disini dilaksanakan dengan teknik wawancara terstruktur.

Wawancara ini juga dapat dikatakan sebagai wawancara terkontrol yakni seluruh wawancara dilakukan berdasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti atau orang yang melaksanakan observasi ikut hadir secara langsung dalam kehidupan objek. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar visual atau rangkaian karya bersejarah dari seseorang. Kegiatan analisis data yakni sebagai berikut : Data Reduction (Redaksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis disini memaparkan penelitian yang dilakukan terhadap efektivitas penyaluran bantuan logistik pada korban bencana banjir berdasarkan teori Efektivitas menurut Duncan (dalam Maulana Mufis, 2016). Teori tersebut menerapkan tiga dimensi dalam efektivitas yaitu dimensi pencapaian tujuan, dimensi adaptasi dan dimensi integrasi yang kemudian peneliti kaitkan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dengan dimensi dan sub dimensi yang telah di tentukan oleh peneliti.

#### **3.1 Tercapainya Target dan Sasaran Bantuan Logistik**

Dalam penyaluran bantuan logistik kepada para korban bencana dilakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pemberian bantuan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para korban di lapangan. Kemudian adapun program yang telah dilakukakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal penanganan pada korban bencana banjir adalah memberikan bantuan logistik sebagai berikut :

1. Kebutuhan Pokok yaitu berupa: beras, sarden, mie instan, minyak goreng, kecap manis, beras, telur, pakaian, seragam sekolah, kebutuhan ibu ibu hamil dan menyusui, kit ware dan family kit.

2. Memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai mitigasi, pencegahan mengurangi resiko bencana.
3. Pelayanan Dapur Umum lapangan Menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari Camat dan lurah (sebagai penanggung jawab).

Bantuan yang disalurkan kepada para korban bencana alam sudah sesuai hasil evaluasi yang dibuat oleh perangkat kecamatan/kelurahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lurah Air Raja mengatakan bahwa: bantuan yang disalurkan kepada korban bencana sudah sesuai data-data yang terekam dari hasil identifikasi. Sehingga dengan jelas, mereka yang berhak menerima bantuan tersebut.

### **3.2 Ketepatan Waktu Dalam Menyalurkan Bantuan Logistik**

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa mengenai penyaluran bantuan logistik bencana alam, terutama yang terkena musibah banjir dan tanah longsor selalu diberikan meski demikian kurang tepat waktu. Karena diberikan setelah berselang beberapa waktu terjadinya musibah banjir atau tanah longsor, maka bantuan tersebut barulah diterima. Jika dicermati mengenai penyaluran bantuan bencana alam tidak serta merta, tetapi selalu mengacu pada mekanisme yang ada, karena sistem yang mengatur penyaluran bantuan tersebut sudah baku maka semua bantuan yang disalurkan kepada korban harus mengikuti prosedur atau mekanisme yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh jalur birokrasi yang memang tidak bisa dipangkas dan semua itu diatur sesuai ketentuan yang berlaku, dan disamping itu perlu proses administrasi yang telah ditentukan berdasarkan mekanisme yang ada, sehingga cukup beralasan jika penyaluran bantuan kurang tepat waktu.

### **3.3 Sumber Daya Manusia**

Keberadaan sumber daya aparatur yang bertindak sebagai tim pelaksana yang menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas termasuk cukup memadai. Meski demikian perlu penambahan, mengingat banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris BPBD Andhika Oktorananda yang mengatakan bahwa: jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) cukup memadai, ditambah dengan kualitasnya. Dikarenakan adanya pelatihan- pelatihan bagi pegawai di BPBD sebagai penunjang skill dan kinerja. Namun melihat kebutuhan dilapangan kami rasa perlu adanya perekrutan/penambahan jumlah personil.

Dengan mempertimbangkan banyaknya kasus banjir maka dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan perlu penambahan anggota tim pelaksana.

Terutama dalam menghadapi kejadian yang sifatnya tanggap darurat, maka diperlukan anggota tim yang lebih banyak, sehingga untuk sementara waktu para korban akan mendapat pertolongan secepatnya.

### 3.4 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data dan informasi yang ada, sarana dan prasarana Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang cukup memadai dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Namun diperlukannya pula penambahan fasilitas demi mendukung kinerja dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang bahwa: fasilitas yang tersedia di BPBD (Badan penanggulangan Bencana Daerah) Kota Tanjungpinang dalam menunjang pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, fasilitas sarana dan prasarana yang ada cukup memadai. Namun disamping itu perlu adanya pelatihan bagi para anggotanya demi menunjang kinerja dan kemampuan dalam bekerja.

**Tabel 3.1**

#### **Sarana dan Prasarana BPBD Kota Tanjungpinang**

No	Fasilitas	Satuan	Jumlah
1	Bangunan	Unit	3
2	Kendaraan Roda 6	Unit	2
3	Kendaraan Roda 4	Unit	6
4	Kendaraan Roda 3	Unit	2
5	Kendaraan Roda 2	Unit	10
6	Speed Boat	Unit	2
7	Perahu Karet	Unit	2

Kemudian terdapat berbagai jenis logistik dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban bencana banjir Kota Tanjungpinang. Jenis dan bantuan logistik yang disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana dapat diklasifikasi ke dalam kelompok sandang, pangan dan papan. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan kepada BPBD Kota Tanjungpinang yang terdampak bencana banjir 2021, tentang sumber logistik untuk masyarakat, peneliti memperoleh informasi atau jawaban yang tidak jauh berbeda, bahwa logistik dan bantuan untuk masyarakat korban bencana banjir secara resmi di peroleh dari pihak pemerintah. Selain dari pemerintah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya sumber logistik dan bantuan bagi masyarakat korban bencana juga diperoleh dari lembaga non pemerintah/dunia usaha, organisasi dan perorangan.



### **3.5 Kemampuan Anggaran**

Minimnya anggaran yang tersedia untuk operasional dan penyediaan personil kedaruratan untuk membantu tugas di lapangan pada saat terjadinya bencana, sehingga hal ini juga yang menjadi suatu kendala bagi BPBD dalam menyalurkan bantuan logistik dengan efektif, cepat dan efisien.

### **3.6 Strategi**

Untuk kesuksesan suatu proses maka perlu adanya suatu konsep perencanaan strategis dan perencanaan implementasi (rencana aksi) yang jelas. Perencanaan dalam pengelolaan bencana di Kota Tanjungpinang merupakan perencanaan sektoral yang ditunjukkan untuk mencapai penanganan bencana banjir yang dapat melindungi korban terdampak dari dampak bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD bahwa : saat kejadian awal bencana yang diperoleh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melaksanakan tugas pengkajian dampak bencana dan memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana banjir. Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat bencana banjir dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala pelaksana BPBD Kota Tanjungpinang untuk mengusulkan kepada Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, dengan memperhatikan usulan dari Kepala Pelaksana BPBD tersebut di atas, Walikota Tanjungpinang menetapkan status/tingkatan skala bencana.

### **3.7 Komunikasi dan Koordinasi**

Pengelolaan bencana banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang saja, akan tetapi dibutuhkan aktor-aktor lain yang ikut berpartisipasi untuk terlibat membantu penanggulangan bencana. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris BPBD, bahwa: Dalam pelaksanaan bantuan logistik, diperlukan adanya unsur-unsur pendukung dari berbagai arah, tidak hanya dari unsur pemerintah saja tetapi juga dapat melalui masyarakat lain secara langsung yang ikut serta membantu masyarakat lain yang terkena bencana. Sehingga diperlukannya koordinasi dan kerjasama yang dijalin antar stakeholder tersebut dapat memperlancar terlaksananya mekanisme pendistribusian bantuan logistik bagi korban secara efektif dan efisien serta mengambil langkah- langkah yang baik untuk menangani bencana banjir yang terjadi. Penyaluran bantuan terhadap korban bencana banjir dianggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

### **3.8 Faktor Yang Mendukung**

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang. Melalui kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan untuk penyaluran bantuan kepada para korban bencana. Alokasi anggaran yang besar, maka semua korban bencana alam dan non alam di wilayah KotaTanjungpinang dapat diberikan bantuan sesuai hasil indentifikasi kerusakan oleh anggota tim pelaksana.

### **3.9 Faktor yang Menghambat**

Bahwa kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penanganan banjir ini adalah keterbatasan dana. Di samping itu, sumber daya manusia dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri hanya sedikit dan sangat kurang untuk diturunkan dalam penanganan bencana banjir. Maka dari itu mereka belum bisa menjalankan secara efektif dan efisien secara maksimal. Penyaluran bantuan terhadap korban bencana banjir dianggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andhika, ada beberapa hambatan dan kendala dalam penanganan banjir, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan  
Pelaksanaan manajemen bencana, kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang adalah keterbatasan logistik. Akibat keterbatasan logistik tersebut menyebabkan penanggulangan bencana pada saat darurat bencana menjadi terhambat dan tidak maksimal dalam melaksanakan manajemen bencana yang baik.
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM)  
Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan, dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah ditugaskan dalam penanggulangan bencana. Para anggota dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang memerlukan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dan mendukung penyelenggaraan penanggulangan kegiatan tanggap darurat khususnya dalam pendistribusian logistik. Kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya.
3. Keakuratan informasi  
Kendala selanjutnya yang dihadapi dalam Penanggulangan Bencana khususnya dalam penanganan darurat bencana di Kota Tanjungpinang

adalah kurang akuratnya informasi atau data yang didapat dari keterangan yang ada di lapangan atau lokasi bencana banjir. Data yang kurang akurat menyebabkan penanganan bencana banjir yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena biasanya informasi yang datang dari lokasi bencana banjir adalah data primer yang langsung diberikan tindakan oleh BPBD Kota Tanjungpinang. Kurang akuratnya data yang diperoleh menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana untuk menyiapkan rencana anggaran dan program kerja yang akan dilakukan di masa mendatang.

4. Keterbatasan anggaran

Kendala yang terakhir dan memang biasa terjadi di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu kurang optimalnya dana yang didapat atau dimiliki, dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang yang juga memiliki keterbatasan dana dalam penanggulangan bencana banjir di Tanjungpinang. Minimnya anggaran untuk operasional dan penyediaan personil kedaruratan untuk membantu tugas di lapangan pada saat bencana banjir terjadi dapat menghambat jalannya penanganan darurat.

### **3.10 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai efektivitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga penanggulangan bencana dan keadaan darurat di Kota Tanjungpinang yang berfokus pada pelayanan dasar kedaruratan bencana, ditemukan bahwa layanan pemberian bantuan logistik belum efektif, dilihat dari indikator ketepatan waktu penyaluran, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kepuasan kerja yang setidaknya ada 3 indikator yang masih sangat perlu dibenahi. Selain itu, masih dijumpai setidaknya ada 4 faktor utama yang menghambat efektivitas dalam pemberian bantuan logistik diantaranya adalah keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan, kurangnya sumber daya manusia, keakuratan informasi, dan keterbatasan anggaran, kemudian mengakibatkan buruknya koordinasi antar OPD. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang untuk menghadapi faktor penghambat tersebut diantaranya adalah dengan mekanisme penyaluran bantuan yang telah dilakukan dengan SOP penanganan bencana agar terus dimaksimalkan, mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawainya dalam hal pemahaman mengenai manajemen bencana dan diboboti sesuai bidangnya, serta membangun koordinasi dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Tanjungpinang.

## **IV. KESIMPULAN**

Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengenai bantuan logistik bencana alam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2016 secara faktual dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada para korban yang terkena musibah/bencana, baik yang mengalami musibah banjir maupun terkena bencana lainnya. Dengan mencermati fenomena yang terjadi di objek penelitian mengenai efektivitas penyaluran bantuan logistik tersebut secara implementatif kurang optimal, karena secara aplikatif masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya mengenai jalur birokrasi yang panjang, sehingga penyaluran bantuan kepada kelompok sasaran (para korban) mengalami keterlambatan. Dalam mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan dapat dikatakan sesuai dengan prosedur yang dilakukan yakni SOP penanganan bencana dengan pengusulan yang dilakukan mulai dari pihak lurah kepada camat hingga pemerintahan Kota Tanjungpinang.

Bentuk Bantuan yang disalurkan juga sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir yakni kebutuhan pokok, obat-obatan dan pembinaan sosial bagi korban. Namun penyaluran bantuan logistik bencana alam kepada para korban di wilayah Kota Tanjungpinang ditinjau dari segi waktu kurang efektif, tetapi ditinjau dari capaian pada kelompok sasaran menunjukkan indikasi tepat sasaran atau penyaluran bantuan disampaikan kepada para korban yang berhak menerimanya dan besaran bantuan diberikan sesuai identifikasi data yang diperoleh di setiap peristiwa/kejadian.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Duncan.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk penyaluran bantuan logistik pada korban bencana banjir. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyaluran bantuan logistik pada korban bencana banjir di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang terlibat membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Abdurahmat. Pengertian Efektivitas. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Albrow, M. Birokrasi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1996.

Abdullah, Irawan. Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam. Fak Pascasarjana Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2008.

Darmawi, Herman. Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Gibson. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Erlangga, 1985.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Nurjanah R. Sugiharto, Kuswanda D. Siswanto dan Adikoesoemo. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta, 2013.

Purnomo, Hadi & Sugiantoro, Ronny. Manajemen Bencana. Jakarta: Media Pressindo, 2010.

Lestanata, Yudhi, and Ulung Pribadi. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014–2015." Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik 3 (2016).

Mughron, Maulana Mufis. "Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang." Universitas Diponegoro, 2016.

Sahilala, I. M., Sarwono dan Hanafi I., 2015. Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris Pada Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 3, No. 5

Kementerian Keuangan. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 2015," 2015.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13. Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana, 2008.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4. Pedoman Bantuan Logistik, 2009.

Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 81. Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24. "Penanggulangan Bencana." In Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, 2007.